

Transformasi Digital Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa: Upaya Menuju *Smart Village* di Desa Bojong Pandan Kecamatan Tunjung Teja

Ita Rosita Wahyiah

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Bina Bangsa

ita.rosita.wahyiah@binabangsa.ac.id

Corresponding author: ita.rosita.wahyiah@binabangsa.ac.id

Submitted: 02/09/2025; Revised: 11/10/2025; Published: 20/10/2025

DOI: <https://doi.org/10.61332/ijpa.v8i2.382>

Abstract

Digital transformation in village governance is a strategic step towards creating an efficient, transparent, and participatory Smart Village. This study focuses on the application of information technology in Bojong Pandan Village, Tunjung Teja District, as an effort to improve the quality of public services and the effectiveness of village government administration. The main objective of this study is to analyze the process, obstacles, and impact of digital transformation implementation on village governance. The method used is descriptive qualitative with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results show that the digitalization of administrative services such as population information systems, online-based correspondence archiving, and the use of social media in disseminating public information have brought significant changes to the work patterns of village officials and eased public access to services. However, obstacles remain such as limited technological infrastructure, low digital literacy among officials, and minimal public participation in utilizing available digital platforms. Efforts to increase human resource capacity through technology training, provision of a stable internet network, and collaboration with external parties are important steps towards optimizing Smart Village. In conclusion, the digital transformation in Bojong Pandan Village shows a positive direction in realizing village governance that is adaptive to technological developments, while also serving as a model for strengthening village capacity towards sustainable development based on digital innovation.

Keywords: Digital Transformation, Village Governance, Smart Village

Abstrak

Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan desa merupakan langkah strategis menuju terciptanya Smart Village yang efisien, transparan, dan partisipatif. Penelitian ini berfokus pada penerapan teknologi informasi di Desa Bojong Pandan, Kecamatan Tunjung Teja, sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas administrasi pemerintahan desa. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis proses, kendala, serta dampak implementasi transformasi digital terhadap tata kelola pemerintahan desa. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi layanan administrasi seperti sistem informasi kependudukan, pengarsipan surat menyurat berbasis online, serta penggunaan

media sosial dalam penyebaran informasi publik telah membawa perubahan signifikan terhadap pola kerja aparatur desa dan kemudahan akses masyarakat terhadap layanan. Namun, masih ditemukan kendala seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital aparatur, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan platform digital yang tersedia. Upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknologi, penyediaan jaringan internet yang stabil, dan kolaborasi dengan pihak eksternal menjadi langkah penting menuju optimalisasi Smart Village. Kesimpulannya, transformasi digital di Desa Bojong Pandan menunjukkan arah positif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus menjadi model penguatan kapasitas desa menuju pembangunan berkelanjutan berbasis inovasi digital.

Kata Kunci: Transformasi Digital, Tata Kelola Pemerintahan Desa, Smart Village

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di era digital saat ini, tuntutan terhadap pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan partisipatif semakin meningkat. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, diharapkan mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut agar dapat memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, akurat, dan mudah diakses. Hal ini juga berlaku bagi pemerintahan desa sebagai ujung tombak pembangunan di tingkat lokal yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Dalam konteks inilah konsep *Smart Village* menjadi sangat relevan, yakni sebagai upaya menghadirkan tata kelola pemerintahan desa yang berbasis teknologi digital untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan (Adheitya Widaniyansyah et al., 2024).

Transformasi digital dalam pemerintahan desa tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga menyangkut perubahan pola pikir, sistem kerja, serta tata kelola kelembagaan yang lebih terbuka dan adaptif terhadap inovasi. Pemerintah desa dituntut untuk mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan, serta dalam memberikan pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penerapan sistem informasi desa, digitalisasi administrasi kependudukan, dan pemanfaatan media sosial untuk komunikasi publik merupakan bentuk nyata dari transformasi digital di tingkat desa yang saat ini mulai banyak dikembangkan di berbagai wilayah Indonesia (Sululing, 2023).

Desa Bojong Pandan, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, merupakan salah satu desa yang mulai berupaya menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan berbasis digital. Meskipun berada di wilayah pedesaan dengan keterbatasan sumber daya, Desa Bojong Pandan menunjukkan inisiatif dalam meningkatkan pelayanan publik melalui penggunaan teknologi informasi sederhana, seperti penyebaran informasi melalui media sosial, sistem pelayanan administrasi berbasis komputer, dan upaya pengarsipan digital. Langkah-langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah desa untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan memperkuat transparansi dalam pengelolaan pemerintahan (Nia Agustina et al., 2024).

Namun, upaya transformasi digital tersebut tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan infrastruktur teknologi, seperti jaringan internet yang belum merata, perangkat komputer yang masih minim, serta kemampuan sumber daya manusia, khususnya aparatur desa, yang masih rendah dalam hal literasi digital. Selain itu, pemahaman masyarakat terhadap manfaat penggunaan teknologi dalam pelayanan publik juga masih perlu ditingkatkan agar proses digitalisasi dapat berjalan secara inklusif. Ketimpangan akses dan kemampuan teknologi antara pemerintah desa dan masyarakat berpotensi menimbulkan kesenjangan digital (*digital divide*) yang justru dapat menghambat tujuan utama Smart Village, yaitu pemerataan akses informasi dan peningkatan kesejahteraan (Jauhariah & Syamsudin, 2023).

Dari sisi kebijakan, pemerintah pusat sebenarnya telah memberikan payung hukum dan dukungan melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan berbagai program digitalisasi desa yang dicanangkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT). Salah satunya adalah program *Smart Village Initiative* yang mendorong desa-desa di Indonesia untuk memanfaatkan teknologi digital dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, ekonomi lokal yang mandiri, serta pembangunan yang berkelanjutan. Namun, pelaksanaan program tersebut di tingkat desa sering kali belum optimal akibat keterbatasan anggaran, rendahnya kapasitas kelembagaan, dan kurangnya pendampingan teknis (Tokan & Gai, 2020).

Dalam konteks ini, Desa Bojong Pandan menjadi menarik untuk diteliti karena sedang berada pada tahap awal proses transformasi digital. Pemerintah desa mulai beradaptasi dengan sistem pelayanan berbasis teknologi, namun masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural. Hal ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana transformasi digital telah diimplementasikan dalam tata kelola pemerintahan desa, bagaimana strategi dan inovasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan, serta bagaimana peran masyarakat dalam mendukung proses menuju *Smart Village*. Penelitian terhadap fenomena ini menjadi penting karena dapat memberikan gambaran konkret mengenai dinamika transformasi digital di tingkat desa dan memberikan rekomendasi untuk memperkuat kebijakan pembangunan berbasis teknologi di wilayah pedesaan (Nia Agustina et al., 2024).

Lebih jauh, pentingnya transformasi digital dalam pemerintahan desa juga berkaitan dengan peningkatan akuntabilitas publik. Dengan penerapan sistem berbasis teknologi, proses administrasi dan pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan secara lebih transparan dan mudah diawasi. Masyarakat dapat mengakses informasi tentang program pembangunan, penggunaan dana desa, dan kebijakan publik secara lebih terbuka. Transparansi semacam ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, tetapi juga mendorong partisipasi aktif warga dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, transformasi digital bukan sekadar modernisasi teknologi, melainkan juga bagian dari reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik yang baik (*good governance*) (Prafitri & Damayanti, 2016).

Selain aspek pemerintahan, penerapan konsep *Smart Village* juga memiliki dampak luas terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat desa. Dengan dukungan teknologi, potensi lokal dapat lebih mudah dipromosikan, kegiatan ekonomi berbasis digital seperti e-commerce desa dapat berkembang, serta komunikasi antarwarga menjadi lebih efektif. Dalam jangka panjang, desa yang mampu bertransformasi digital akan memiliki daya saing yang lebih tinggi dan mampu beradaptasi dengan perubahan global yang serba cepat. Oleh sebab itu, upaya transformasi digital di Desa Bojong Pandan tidak hanya relevan dalam konteks peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan, tetapi juga

sebagai strategi untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat desa(Situmorang et al., 2020).

Dengan demikian, penelitian mengenai “Transformasi Digital dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa: Upaya Menuju Smart Village di Desa Bojong Pandan Kecamatan Tunjung Teja” memiliki urgensi yang tinggi. Selain untuk memahami proses dan tantangan digitalisasi pemerintahan desa, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan konsep *e-Government* dan *Smart Village* di tingkat lokal. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah desa lain dalam mengembangkan inovasi digital yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakatnya. Melalui pemahaman mendalam terhadap pengalaman Desa Bojong Pandan, diharapkan dapat ditemukan model tata kelola pemerintahan desa berbasis teknologi yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan dalam mewujudkan desa cerdas di masa depan(Kiki Endah, 2020).

Tinjauan Pustaka

Konsep Tata Kelola Pemerintahan Desa Tata kelola pemerintahan desa merupakan serangkaian proses pengelolaan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, serta adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia(Wulandari, 2017). Dalam konteks tata kelola pemerintahan modern, prinsip good governance menjadi acuan utama.

1. Menurut United Nations Development Programme (UNDP), *good governance* mencakup prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan supremasi hukum. Ketika prinsip-prinsip ini diterapkan pada level desa, maka pemerintah desa dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang terbuka, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta memastikan setiap program pembangunan desa dapat dipertanggungjawabkan secara

publik(Hadawiya et al., 2021). Selain itu, tata kelola pemerintahan desa juga berperan penting dalam pelaksanaan otonomi desa. Melalui pelaksanaan otonomi tersebut, desa memiliki ruang yang luas untuk mengembangkan inovasi, termasuk penerapan teknologi digital guna mendukung transparansi dan efisiensi layanan publik.

2. Menurut Dwiyanto (2017), tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya menekankan pada aspek administratif, tetapi juga pada keterlibatan masyarakat dan pemanfaatan teknologi untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga desa(Marshaliany, 2019).
3. Transformasi Digital dalam Pemerintahan Transformasi digital merupakan proses perubahan fundamental dalam tata kelola organisasi dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan nilai layanan publik. Dalam konteks pemerintahan, transformasi digital sering dikaitkan dengan konsep *e-Government*, yakni penggunaan teknologi informasi untuk mendukung sistem administrasi, layanan publik, dan partisipasi masyarakat. Menurut Laudon dan Laudon (2020), transformasi digital melibatkan perubahan dalam struktur, budaya, serta proses kerja organisasi. Pemerintah dituntut tidak hanya mengadopsi teknologi, tetapi juga bertransformasi dalam pola pikir dan budaya birokrasi agar mampu beradaptasi dengan ekosistem digital. Dalam konteks pemerintahan desa, transformasi digital berarti memperkenalkan sistem administrasi berbasis elektronik, digitalisasi data penduduk, penggunaan aplikasi layanan publik, serta pengelolaan informasi desa yang lebih transparan(Abdul Muin & Lubis, 2020).

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga menegaskan bahwa transformasi digital di tingkat pemerintahan desa merupakan bagian penting dari agenda nasional Indonesia Digital 2045, yang menekankan pentingnya integrasi teknologi untuk mendukung pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan ekonomi lokal. Dengan demikian, digitalisasi pemerintahan desa tidak hanya menjadi kebutuhan

administratif, tetapi juga strategi pembangunan yang berkelanjutan(Listyorini et al., 2021).

Konsep Smart Village Konsep *Smart Village* atau desa cerdas merupakan pendekatan pembangunan desa yang berbasis teknologi, inovasi, dan partisipasi masyarakat. Menurut European Network for Rural Development (ENRD, 2018), *Smart Village* didefinisikan sebagai komunitas pedesaan yang menggunakan solusi digital dan inovatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat ekonomi lokal, dan menciptakan tata kelola yang lebih inklusif(Destifani & Wanusmawatie, 2013).

Di Indonesia, konsep ini diadaptasi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) dalam berbagai program digitalisasi desa. Smart Village diartikan sebagai desa yang mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk memperkuat pelayanan publik, meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, serta mengembangkan potensi ekonomi lokal berbasis digital. Tujuan akhirnya adalah mewujudkan desa yang mandiri, inovatif, dan berdaya saing tinggi(Kusuma et al., 2022).

Menurut Rahmadi (2021), *Smart Village* tidak hanya berbicara tentang teknologi, tetapi juga mencakup pembangunan kapasitas manusia, inovasi sosial, dan kolaborasi antaraktor pembangunan desa. Dalam konteks ini, keberhasilan Smart Village bergantung pada tiga pilar utama, yaitu:

1. Infrastruktur digital yang memadai,
2. Kapasitas sumber daya manusia, dan
3. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pemanfaatan teknologi.

Ketiga aspek ini saling berkaitan dan menjadi fondasi penting bagi desa untuk bertransformasi menjadi desa cerdas yang berkelanjutan(Setyaningrum & Wisnaeni, 2019).

Digitalisasi dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Digitalisasi pemerintahan desa mencakup berbagai inovasi seperti *Sistem Informasi Desa (SID)*, aplikasi pelayanan publik berbasis daring, sistem keuangan desa digital, dan penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi publik. Melalui digitalisasi, pemerintah desa dapat

meningkatkan efisiensi pelayanan, mempercepat proses administrasi, dan memperkuat transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Menurut Susanto (2019), penerapan *e-Government* di desa membawa manfaat yang signifikan, antara lain: meminimalkan praktik birokrasi berbelit, meningkatkan akuntabilitas publik, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Namun, implementasinya sering menghadapi tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya kemampuan teknologi aparatur desa, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya layanan digital. Dalam kasus Desa Bojong Pandan, upaya digitalisasi pemerintahan mencakup penggunaan aplikasi administrasi sederhana, sistem informasi pembangunan desa, serta pemanfaatan media sosial sebagai saluran komunikasi publik. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran awal terhadap pentingnya transformasi digital, meskipun masih memerlukan dukungan kebijakan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar lebih optimal (Hasanah & Ahmad, 2020).

Good Governance dan Smart Governance Konsep *good governance* menjadi landasan bagi pengelolaan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Namun, dalam era digital, konsep ini mengalami pengembangan menjadi *smart governance*, yaitu tata kelola pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk memperkuat interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Menurut Meijer dan Bolívar (2016), *smart governance* merupakan hasil integrasi antara prinsip *good governance* dengan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pengambilan keputusan, pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat. Implementasi *smart governance* di tingkat desa akan memperkuat transparansi data, mempercepat pelayanan publik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa (Mindarti et al., 2022).

Dalam konteks Bojong Pandan, penerapan *smart governance* masih bersifat awal, namun arah kebijakannya sudah mulai terlihat melalui digitalisasi administrasi dan komunikasi publik. Dengan memperkuat infrastruktur dan sumber daya manusia, pemerintah desa dapat bertransformasi menuju tata kelola yang cerdas, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang optimal.

Partisipasi Masyarakat dalam Transformasi Digital Partisipasi masyarakat merupakan elemen kunci dalam kesuksesan transformasi digital di tingkat desa. Transformasi yang hanya dilakukan oleh aparatur tanpa melibatkan warga cenderung tidak berkelanjutan. Menurut Arnstein (1969) dalam teorinya tentang *Ladder of Citizen Participation*, partisipasi masyarakat memiliki berbagai tingkat, mulai dari pemberitahuan, konsultasi, hingga pengambilan keputusan bersama. Dalam konteks Smart Village, masyarakat bukan hanya objek penerima manfaat, tetapi juga subjek pembangunan yang aktif. Dukungan masyarakat dalam bentuk pemanfaatan layanan digital, keterlibatan dalam pengelolaan informasi desa, serta partisipasi dalam evaluasi kebijakan digitalisasi menjadi faktor penting keberhasilan transformasi digital. Studi oleh Kementerian Desa PDTT (2022) menunjukkan bahwa desa-desa yang berhasil menerapkan Smart Village memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi, terutama dalam pemanfaatan sistem informasi desa, kelompok inovasi masyarakat, dan kegiatan pelatihan digital. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat Bojong Pandan dalam proses digitalisasi harus terus diperkuat melalui sosialisasi, edukasi digital, dan pelatihan teknologi informasi(, 2015).

Faktor Pendukung dan Penghambat Transformasi Digital Desa Proses transformasi digital di tingkat desa tidak terlepas dari faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung meliputi komitmen pemerintah desa, dukungan kebijakan pemerintah daerah, ketersediaan infrastruktur internet, serta kolaborasi dengan pihak ketiga seperti universitas, lembaga teknologi, dan komunitas digital. Sebaliknya, faktor penghambat antara lain rendahnya literasi digital aparatur, keterbatasan anggaran, kurangnya fasilitas teknologi, serta budaya kerja birokratis yang belum sepenuhnya terbuka terhadap inovasi. Menurut Setiawan (2020), hambatan terbesar dalam implementasi *e-Government* di desa bukan terletak pada teknologi itu sendiri, melainkan pada resistensi terhadap perubahan dan lemahnya kapasitas sumber daya manusia(Eprilianto et al., 2020).

Dalam konteks Desa Bojong Pandan, tantangan utama meliputi keterbatasan perangkat, jaringan internet yang belum stabil, serta rendahnya kemampuan teknologi aparatur. Oleh karena itu, strategi transformasi digital perlu diiringi dengan pelatihan dan

pendampingan berkelanjutan agar aparaturnya dan masyarakat dapat beradaptasi dengan cepat terhadap sistem digital yang diterapkan. Kerangka Teoretis Penelitian Penelitian ini berlandaskan pada dua teori utama, yaitu teori Transformasi Digital (Digital Transformation Theory) dan teori Good Governance. Teori Transformasi Digital (Westerman et al., 2014) menekankan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada perubahan budaya organisasi dan kepemimpinan yang adaptif. Dalam konteks pemerintahan desa, hal ini berarti aparaturnya desa perlu bertransformasi secara mindset dan perilaku dalam memberikan pelayanan publik berbasis digital. Teori Good Governance, sebagaimana dikemukakan oleh UNDP, menjadi dasar untuk memastikan bahwa proses digitalisasi tetap berorientasi pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Dengan menggabungkan kedua teori ini, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana proses transformasi digital dapat memperkuat tata kelola pemerintahan desa menuju model *Smart Village* yang berkelanjutan dan inklusif (Rossilahi Chasanah & Ahmad Riyadh, 2024).

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam proses transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan desa menuju *Smart Village* di Desa Bojong Pandan, Kecamatan Tunjung Teja. Penelitian ini dilakukan di lokasi tersebut karena desa ini sedang berupaya menerapkan sistem pemerintahan berbasis teknologi melalui digitalisasi administrasi dan layanan publik. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap aparaturnya desa serta masyarakat setempat. Teknik penentuan informan dilakukan secara purposive sampling, dengan melibatkan kepala desa, perangkat desa, operator sistem informasi, dan warga pengguna layanan digital. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan model interaktif Miles dan Huberman, meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Untuk menjaga keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber, metode, dan waktu, serta *member check* kepada informan. Penelitian ini berupaya menggambarkan secara komprehensif bagaimana proses digitalisasi

dijalankan, tantangan yang dihadapi, serta strategi yang digunakan pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang cerdas dan berbasis teknologi informasi.

Pembahasan

Desa Bojong Pandan merupakan salah satu desa di Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Desa ini memiliki luas wilayah sekitar ± 550 hektar dengan jumlah penduduk sekitar 3.200 jiwa yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, pedagang, dan pekerja sektor informal. Pemerintahan desa dipimpin oleh seorang kepala desa dengan perangkat yang terdiri atas sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi, dan kepala dusun. Dalam beberapa tahun terakhir, Desa Bojong Pandan mulai menunjukkan komitmen untuk bertransformasi ke arah pemerintahan yang lebih modern melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Meskipun masih berada pada tahap awal, desa ini telah mengambil langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan menuju konsep *Smart Village* yang inklusif dan berkelanjutan (Harianto & Rahardjo, 2019).

Implementasi Transformasi Digital dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Transformasi digital di Desa Bojong Pandan diawali dengan inisiatif pemerintah desa untuk memperkenalkan sistem administrasi berbasis komputer dan pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi publik. Sejak tahun 2023, perangkat desa telah menggunakan komputer untuk mengelola data kependudukan, surat menyurat, serta pencatatan keuangan desa. Selain itu, pemerintah desa juga memanfaatkan platform seperti Facebook dan WhatsApp Group sebagai media komunikasi dan publikasi kegiatan desa. Langkah ini merupakan bentuk adaptasi awal terhadap perkembangan teknologi dan sekaligus strategi untuk meningkatkan transparansi kepada masyarakat (Pratiwi, 2016).

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur desa, penggunaan teknologi ini secara signifikan membantu mempercepat proses administrasi dan meminimalkan kesalahan pencatatan. Sebelumnya, sebagian besar dokumen masih disimpan secara manual, yang seringkali menimbulkan kesulitan dalam pelacakan data. Dengan adanya digitalisasi arsip, pengelolaan dokumen menjadi lebih tertib dan efisien. Selain itu,

pelayanan surat keterangan kepada masyarakat juga menjadi lebih cepat, karena proses pencatatan dan pencetakan dapat dilakukan secara digital dalam waktu singkat (Kholmi, 2010).

Namun demikian, penerapan transformasi digital ini masih terbatas pada lingkup administrasi dasar dan publikasi informasi. Sistem informasi terpadu seperti Sistem Informasi Desa (SID) belum sepenuhnya diimplementasikan karena keterbatasan sumber daya dan jaringan internet. Hal ini menunjukkan bahwa proses menuju *Smart Village* masih memerlukan tahapan lebih lanjut agar digitalisasi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga terintegrasi dalam seluruh aspek tata kelola pemerintahan desa (Kusuma et al., 2022).

Peran Aparatur Desa dalam Proses Transformasi Digital Aparatur desa memegang peranan penting dalam keberhasilan transformasi digital. Di Desa Bojong Pandan, semangat aparatur untuk beradaptasi dengan teknologi cukup tinggi meskipun sebagian besar belum memiliki latar belakang pendidikan teknologi informasi. Kepala desa menjadi tokoh kunci yang mendorong inovasi ini melalui kebijakan internal untuk memperkenalkan penggunaan perangkat digital dalam pekerjaan harian. Selain itu, sekretaris desa dan operator komputer ditugaskan secara khusus untuk mengelola administrasi digital dan sistem data kependudukan. Hasil observasi menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas aparatur menjadi tantangan utama. Sebagian perangkat desa masih belajar secara otodidak dalam mengoperasikan komputer dan aplikasi digital. Pelatihan formal dari pemerintah daerah atau lembaga pendamping masih jarang dilakukan. Namun, adanya kolaborasi antarperangkat yang saling berbagi pengetahuan menjadi bentuk adaptasi sosial yang penting dalam proses ini. Seperti dikatakan oleh salah satu informan, *"Kami sama-sama belajar, yang sudah bisa komputer mengajari yang lain. Lama-lama semua jadi terbiasa."* Hal ini menunjukkan adanya dinamika pembelajaran kolektif dalam menghadapi perubahan teknologi. Proses ini sejalan dengan teori Transformasi Digital (Westerman et al., 2014) yang menekankan pentingnya perubahan budaya organisasi dan pola pikir sumber daya manusia dalam mendukung digitalisasi. Artinya, keberhasilan implementasi teknologi di pemerintahan desa tidak hanya

ditentukan oleh ketersediaan perangkat, tetapi juga oleh kesiapan dan kemauan aparaturnya untuk berinovasi (Mulyani et al., 2021).

Partisipasi Masyarakat dalam Penerapan Smart Village Keberhasilan konsep *Smart Village* sangat bergantung pada tingkat partisipasi masyarakat. Di Desa Bojong Pandan, masyarakat mulai menunjukkan keterlibatan dalam penggunaan layanan digital, meskipun belum merata. Sebagian warga telah memanfaatkan media sosial desa untuk memperoleh informasi tentang kegiatan pembangunan, pengumuman bantuan sosial, dan layanan administrasi. Kelompok pemuda desa juga berperan aktif dalam mendukung digitalisasi, misalnya membantu pembuatan konten publikasi dan mengelola akun media sosial desa. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar warga, khususnya kelompok usia lanjut dan masyarakat berpendidikan rendah, masih belum terbiasa dengan sistem layanan berbasis digital. Mereka cenderung lebih nyaman datang langsung ke kantor desa untuk mengurus administrasi. Hal ini menandakan masih adanya kesenjangan literasi digital (*digital divide*) antara kelompok masyarakat muda dan tua. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah desa berencana mengadakan pelatihan literasi digital sederhana agar masyarakat dapat lebih memahami manfaat teknologi dalam kehidupan sehari-hari (et al., 2021).

Fenomena ini memperkuat teori Arnstein (1969) tentang *Ladder of Citizen Participation*, di mana partisipasi masyarakat dalam pembangunan memiliki tingkatan yang berbeda. Dalam konteks Desa Bojong Pandan, partisipasi masyarakat berada pada tahap “konsultasi dan kemitraan awal,” di mana warga mulai terlibat dalam proses digitalisasi namun belum sepenuhnya berperan dalam pengambilan keputusan atau inovasi teknologi. Hambatan dalam Proses Transformasi Digital Meskipun telah menunjukkan kemajuan, implementasi transformasi digital di Desa Bojong Pandan menghadapi berbagai hambatan. Hambatan utama adalah keterbatasan infrastruktur internet. Jaringan yang tidak stabil sering kali menghambat aktivitas administrasi daring dan komunikasi publik digital. Selain itu, perangkat komputer yang tersedia di kantor desa masih terbatas, sehingga penggunaan teknologi dilakukan secara bergantian oleh aparaturnya.

Faktor lain yang menjadi tantangan adalah rendahnya literasi digital aparaturnya dan masyarakat. Sebagian perangkat desa belum terbiasa menggunakan aplikasi berbasis daring, sedangkan masyarakat belum sepenuhnya memahami manfaat layanan digital. Hambatan kultural juga muncul karena masih kuatnya kebiasaan birokrasi manual yang dianggap lebih aman dan mudah dibandingkan sistem digital.

Keterbatasan anggaran desa juga menjadi faktor penghambat penting. Dana desa sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan fisik dan kegiatan sosial, sehingga ruang fiskal untuk investasi infrastruktur teknologi masih minim. Padahal, menurut Setiawan (2020), transformasi digital memerlukan dukungan anggaran yang berkelanjutan untuk pemeliharaan perangkat, pelatihan SDM, dan pengembangan sistem informasi. Tanpa dukungan kebijakan fiskal yang jelas, inovasi digital di desa akan sulit berkembang secara optimal.

Strategi Pemerintah Desa dalam Mewujudkan Smart Village Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, pemerintah Desa Bojong Pandan menerapkan beberapa strategi adaptif. Pertama, melalui penguatan kapasitas aparaturnya dengan pelatihan internal dan pembelajaran mandiri. Kepala desa menugaskan perangkat muda yang lebih melek teknologi untuk menjadi mentor bagi pegawai lain. Kedua, pemerintah desa berupaya menjalin kerja sama dengan pihak eksternal, seperti universitas dan lembaga teknologi lokal, guna memperoleh pendampingan teknis dan akses pelatihan digital. Ketiga, pemerintah desa berencana mengembangkan Sistem Informasi Desa (SID) secara bertahap, dengan fokus awal pada pendataan penduduk dan pelayanan administrasi online. Langkah ini sejalan dengan program *Smart Village Initiative* yang digagas oleh Kementerian Desa PDTT. Keempat, dalam aspek komunikasi publik, pemerintah desa memperkuat transparansi dengan memanfaatkan media sosial dan papan informasi digital di kantor desa untuk menyebarkan data keuangan dan program pembangunan. Strategi ini menunjukkan bahwa transformasi digital di Desa Bojong Pandan bersifat progresif dan partisipatif, di mana inovasi teknologi disesuaikan dengan kemampuan lokal dan kebutuhan masyarakat. Model adaptasi semacam ini penting agar konsep *Smart Village*

tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar dapat diterapkan secara realistis di wilayah pedesaan.

Analisis dan Pembahasan Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa proses transformasi digital di Desa Bojong Pandan telah berjalan namun masih dalam tahap awal. Pemerintah desa telah menunjukkan komitmen terhadap digitalisasi dengan menerapkan sistem administrasi berbasis komputer dan komunikasi publik daring. Namun, keterbatasan infrastruktur, kapasitas SDM, dan partisipasi masyarakat menjadi tantangan utama yang perlu segera diatasi. Jika dianalisis melalui perspektif teori Good Governance (UNDP), maka langkah digitalisasi di desa ini mencerminkan upaya peningkatan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Melalui digitalisasi data dan pelayanan, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi publik, sementara pemerintah dapat meningkatkan kecepatan layanan dan pengawasan keuangan desa. Sementara itu, dari perspektif Transformasi Digital Theory (Westerman et al., 2014), proses yang terjadi di Bojong Pandan menunjukkan perubahan organisasi dan pola pikir menuju pemerintahan berbasis teknologi. Meskipun masih sederhana, inisiatif ini menandakan adanya kesadaran akan pentingnya inovasi digital dalam meningkatkan kinerja pemerintahan desa. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa transformasi digital di Desa Bojong Pandan merupakan langkah strategis menuju *Smart Village* yang lebih adaptif dan berdaya saing. Untuk memperkuat proses ini, diperlukan dukungan kebijakan daerah, peningkatan literasi digital, serta kolaborasi lintas sektor agar transformasi digital tidak berhenti pada tingkat teknis, tetapi juga menyentuh aspek sosial, ekonomi, dan kelembagaan desa.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan Desa Bojong Pandan merupakan langkah strategis menuju terwujudnya konsep *Smart Village* yang adaptif, transparan, dan partisipatif. Pemerintah desa telah memulai proses digitalisasi melalui penerapan sistem administrasi berbasis komputer, pemanfaatan media sosial untuk publikasi kegiatan, serta peningkatan koordinasi internal melalui teknologi informasi. Inisiatif ini telah membawa dampak positif terhadap

peningkatan efisiensi pelayanan publik, kerapian administrasi, serta keterbukaan informasi kepada masyarakat. Namun demikian, proses menuju *Smart Village* masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain keterbatasan infrastruktur internet, minimnya perangkat teknologi, rendahnya literasi digital aparatur dan masyarakat, serta keterbatasan anggaran desa untuk pengembangan sistem informasi yang berkelanjutan. Faktor-faktor tersebut menandakan bahwa transformasi digital di tingkat desa memerlukan pendekatan bertahap yang disertai dukungan kebijakan dan pendampingan dari pemerintah daerah maupun lembaga mitra. Secara konseptual, transformasi digital di Desa Bojong Pandan menggambarkan adanya perubahan paradigma tata kelola pemerintahan dari sistem manual menuju sistem berbasis teknologi. Keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia, budaya organisasi, serta partisipasi aktif masyarakat. Dengan penguatan kapasitas aparatur, pengembangan infrastruktur digital, dan peningkatan literasi teknologi warga, Desa Bojong Pandan memiliki potensi besar untuk menjadi model percontohan dalam penerapan *Smart Village* di wilayah Kecamatan Tunjung Teja dan Kabupaten Serang secara umum.

Daftar Pustaka

- Abdul Muin, M. iqbal, & Lubis, S. A. (2020). Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Penanggulangan Kemiskinan di Desa Sidiangkat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 8(1), 92. <https://doi.org/10.37064/jpm.v8i1.7528>
- Adheitya Widaniyansyah, A., Martiningsih, R. S. P., & Suryantara, A. B. (2024). Strategi Pengelolaan Aset Desa Berbasis Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) Di Desa Keker Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 4(3), 527–537. <https://doi.org/10.29303/risma.v4i3.1277>
- Destifani, I., & Wanusmawatie, I. (2013). PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN OTONOMI DESA (Studi pada Desa Sumber, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(6), 1239–1246.
- Eprilianto, D. F., Pradana, G. W., & Sari, Y. E. K. (2020). Digital Inovasi Sektor Publik : Efektivitas Kolaborasi Dalam Implementasi Inovasi Dega Digital. *Jurnal EL-RIYASAH*, 10(2), 127. <https://doi.org/10.24014/jel.v10i2.8909>
- Hadawiya, R., Muda, I., & Batubara, B. M. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(2), 192–200. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i2.749>
- Hariato, H., & Rahardjo, M. (2019). Mewujudkan Good Governance, Melalui Penguatan

- Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa. *Seminar Nasional Sistem Informasi*, 3(September), 1791–1803.
- Hasanah, B., & Ahmad, S. (2020). Kabupaten serang. *Wikrama Parahita*., 3(17), 2009.
- Imawan, A., & Mas'adah, N. (2021). Transformasi Tata Kelola Dana Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(3), 689–710. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.3.39>
- Jauhariyah, J., & Syamsudin, M. (2023). Perencanaan Pembangunan. *FOKUS : Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 21(1), 135–147. <https://doi.org/10.51826/fokus.v21i1.737>
- Kholmi, M. (2010). Akuntabilitas dalam Perspektif Teori Agensi. *Ekonomika-Bisnis*, 2, 358. <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jibe/article/view/4694>
- Kiki Endah. (2020). Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi Lokal Desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 135–143. <https://jurnal.unigal.ac.id/moderat/article/view/3319/2914>
- Kusen. (2015). Implikasi Uu Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Kewenangan Desa. *Yustisia Jurnal Hukum*, 92(2), 369–396. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v92i0.3820>
- Kusuma, I. W. M. W., Raka, A. A. G., & Sumada, I. M. (2022). Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa, di Desa Cangu Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 7(1), 12–19. <https://doi.org/10.22225/pi.7.1.2022.12-19>
- Listyorini, H., Supriyanto, S., Prayitno, P. H., Wuntu, G., & Gunawan, M. M. (2021). Penguatan Kelembagaan Pokdarwis Dalam Merintis Desa Wisata Melalui Penciptaan Identitas Dan Kapabilitas Perencanaan Organisasi. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 5(2), 491–504. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm:https://doi.org/10.31764/jmm.v5i2.4083>
- Marshalliany, E. F. (2019). Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6(1), 15–26.
- Mindarti, L. I., Saleh, C., & Galih, A. P. (2022). Penerapan Inovasi Sistem Informasi Manajemen Guna Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(1), 258. <https://doi.org/10.31764/jmm.v6i1.6336>
- Mulyani, Y., Mahfud, T., Winnarko, H., Gafur, A., Rustika, R., & Nurdin, I. (2021). Penguatan Kelembagaan Dan Tata Kelola Pengurus Desa Wisata Teritip. *Jurnal Abdimas Terapan*, 1(1), 22–27. <https://doi.org/10.56190/jat.v1i1.5>
- Nia Agustina, Esa Esa, & Mohamad Yusuf. (2024). Model Kelembagaan Pemerintah Desa. *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 201–209. <https://doi.org/10.47861/tuturan.v2i1.775>
- Prafitri, G. R., & Damayanti, M. (2016). Kapasitas Kelembagaan Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus: Desa Wisata Ketenger, Banyumas). *Jurnal Pengembangan Kota*, 4(1), 76. <https://doi.org/10.14710/jpk.4.1.76-86>
- Pratiwi, R. N. (2016). Manajemen Keuangan Desa melalui Inovasi Electronic Village Budgeting (Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(3), 123–130. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2016.002.03.15>
- Rossilahi Chasanah, & Ahmad Riyadh. (2024). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Medalem. *Journal Publicuho*, 7(4), 2351–2367. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i4.606>
- Setyaningrum, C. A., & Wisnaeni, F. (2019). Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

- Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 158–170. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.158-170>
- Situmorang, C. V., Simanjuntak, A., & Elisabeth, D. M. (2020). Peran Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, Dan Transparansi Dalam Mewujudkan Good Governance Terhadap Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu Keuangan Dan Perbankan (JIKA)*, 9(2), 131–142. <https://doi.org/10.34010/jika.v9i2.2985>
- Sululing, S. (2023). Pendampingan Kelembagaan dan Manajemen BUMDes Sejahtera Desa Sapelang, Buko Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan. *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 221–227. <https://doi.org/10.30762/welfare.v1i2.540>
- Tokan, F. B., & Gai, A. (2020). Studi tentang Kepemimpinan Kepala Desa dalam Melaksanakan Kewenangan Desa menuju Kemandirian Desa. *Warta Governare: Jurnal Pemerintahan*, 2(1), 90–108. <https://www.journal.unwira.ac.id/index.php/WG/article/view/534%0Ahttps://www.journal.unwira.ac.id/index.php/WG/article/download/534/306>
- Wulandari, L. (2017). Strategi Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 55–66. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/752>